

**Pemantauan Warga dalam Pembangunan Prasarana Pelayanan Publik:  
Studi Kasus Pemantauan Fasilitas Infrastruktur  
oleh Komunitas Penyandang Cacat**

Disampaikan pada: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat 20 September 2005  
Oleh: Cucu Saidah, Bandung Independent Living Center (BILiC)

**Pendahuluan**

Di dunia internasional, istilah dan pengertian disability itu sendiri mengalami perubahan mulai dari *cripple*, *handicap*, *impairment*, lalu kemudian *People with Disability*. Pada tahun 2001 ICF, sebagai bagian dari WHO mengeluarkan definisi disability lebih luas lagi mulai dari visible sampai dengan yang invisible, tetapi yang lebih penting adalah bahwa definisi disability yang terbaru tersebut lebih menekankan pada segi sosialnya. Dimana orang-orang yang tergolong *people with disability* adalah yang mengalami diskriminasi sosial, termasuk Autism, HIV/AIDS, Obesitas dan mental health.

Begitu pula di Indonesia masih belum ditemukan istilah dan pengertian yang tepat atas kecacatan. Istilah yang sekarang digunakan adalah *penyandang cacat* dan *difabel*. Sekedar memberikan pencerahan melalui tulisan ini mengenai kedua istilah tersebut. Penyandang cacat lebih sering diartikan sebagai sesuatu kekurangan atau aib, sehingga orang cenderung lebih ingin menghaluskan istilah tersebut. Apabila kita merujuk pada UU no.4 th 1997, pengertian penyandang cacat sangat sempit dan hanya terbatas kepada fisik atau kalau kita berbicara tentang model, pengertian yang ada pada UU tersebut lebih kepada model medis sehingga hanya terfokus pada fisik yang terlihat.

Sedangkan istilah *difabel* yang berasal dari bahasa Inggris *different ability* lalu disingkat menjadi *difabel*. Dari segi konteks sudah kurang tepat. Yang perlu diingat adalah kita bukan berbicara masalah kemampuan karena jelas setiap orang memiliki kemampuan. Hanya saja caranya yang beda. Misalnya, saya berpindah tempat dengan menggunakan crutch atau tongkat sedangkan anda menggunakan kedua kaki. Begitu juga dengan teman-teman tuli yang berbicara menggunakan jari tangan sedangkan kita menggunakan pita suara. Kalau saya ambil pernyataan Mr. Didi Tarsidi dari World Blind Union "...bukan different ability tetapi same ability in different ways...". Istilah dari difabel itu sendiri juga terkesan ingin menepis pengalaman yang sebenarnya adalah sangat berharga agar kita dapat menunjukkan kebanggaan diri kita sebagai penyandang cacat.

Kemudian saya ingin kita sama-sama merenungkan dengan kondisi dan sikap masyarakat sampai dengan saat ini. Masyarakat lebih berpihak pada "penggunaan istilah yang seolah menghaluskan" tetapi "bagaimana halnya dengan sikap?" yang justru masih sangat jauh dari "upaya penghalusan" tersebut. Oleh karena itu, saya lebih memilih istilah penyandang cacat tetapi dengan pengertian yang lebih luas. Artinya, tidak terfokus pada penampilan fisik tetapi perlakuan sosialnya itu sendiri.

**Landasan Hukum dan Kebijakan yang mengatur Kecacatan**

Indonesia adalah negara yang kaya akan undang-undang dan kebijakan. Mulai dari undang-undang khusus tentang penyandang cacat yang menyebutkan bahwa "setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan" yaitu berhak atas pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan, aksesibilitas, dll. Lebih jauh berbicara tentang aksesibilitas, bahwa sebenarnya sudah ada standarnya di Indonesia yaitu Kepmen PU No. 468 tahun 1998. Sedangkan jika berbicara tentang kewajiban masyarakat dalam aksesibilitas tersebut tercantum dalam UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tertulis bahwa "masyarakat berkewajiban untuk turut mencegah pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum". Namun yang terjadi adalah masyarakat tidak sadar sering menyebabkan sesuatunya menjadi bahaya bagi umum terutama penyandang cacat, orang tua, dan ibu hamil. Sebenarnya peraturan sudah sangat lengkap hanya implementasi dari peraturan yang ada tersebut yang sangat lemah.

## **Sistem Pelayanan Publik**

WHO memperkirakan jumlah penyandang cacat sebanyak 10% dari populasi penduduk. Berdasarkan BPS tahun 2000 bahwa 65.6% penyandang cacat tinggal di pedesaan serta 34.2% tinggal di perkotaan dan 55.7% adalah perempuan (*Country Profile Republic of Indonesia, APCD*).

Kelompok penyandang cacat bisa dikatakan kelompok paling miskin diantara yang miskin, kelompok paling tertindas diantara yang tertindas. Keterbatasan dan diskriminasi dalam akses pendidikan bagi anak penyandang cacat, kurangnya pelatihan dan kesempatan kerja, sulitnya akses untuk perawatan kesehatan termasuk informasi kesehatan reproduksi dan seksual bagi perempuan penyandang cacat, jaminan mendapat alat bantu, permasalahan kesetaraan perempuan penyandang cacat, kurangnya akses terhadap sarana air bersih, informasi dan teknologi, kemiskinan dimana 20-30% diantara orang miskin adalah penyandang cacat dan 90% dari jumlah penyandang cacat adalah buta huruf (*Yutaka Takamine, Disability Issues in East Asia: Review and Ways Forward*), aksesibilitas lingkungan fisik (meliputi jalan, bangunan, dan perumahan) yang sangat buruk, tidak adanya sarana transportasi umum yang aksesibel sehingga sangat menyulitkan penyandang cacat untuk mengakses tempat pelayanan publik itu sendiri, kesetaraan kesempatan berperan aktif dalam pembangunan serta menikmati, kesempatan berperan dalam mengambil kebijakan, diskriminasi dalam hukum, tidak adanya statistik yang akurat, serta sikap masyarakat yang masih negatif dengan stigma dan prasangka buruk terhadap penyandang cacat. Semua itu adalah permasalahan penyandang cacat yang sampai saat ini masih sangat dirasakan.

Berdasarkan hasil penelitian, kurang dari 10% penyandang cacat yang bisa akses mendapatkan pelayanan publik itupun bagi yang tinggal di perkotaan. Rendahnya pengetahuan tentang penyandang cacat dan kesadaran dari para pelayan publik adalah penyebab utama mengapa penyandang cacat tidak mendapatkan haknya dalam pelayanan publik. Selain itu, rendahnya loyalitas dan dedikasi pelayan publik terhadap tugasnya, tidak adanya monitoring yang jelas, tidak adanya law enforcement terhadap kebijakan yang berlaku, tidak dilibatkannya penyandang cacat selaku pengguna pelayanan publik sebagai pengontrol. Semua itu adalah penyebab buruknya system pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu penyandang cacat seringkali tidak mendapatkan haknya sebagai manusia.

## **Sikap Publik terhadap Penyandang Cacat**

Pandangan publik terhadap penyandang cacat sangat penting karena akan menentukan peranan penyandang cacat di masyarakat dan seluas apakah kesempatan yang seharusnya didapat oleh penyandang cacat. Sikap keluarga dan masyarakat kepada penyandang cacat masih menganggap kasihan dan tidak bisa melakukan ini dan itu, menganggap bahwa kecacatan adalah sebagai karma. Dari sikap tersebut maka keluarga merasa bersalah sehingga akan memilih over protective, atau membiarkan begitu saja, membicarakan kecacatan merupakan sesuatu yang tabu. Pengakuan hak dasar sebagai seorang manusia terhadap penyandang cacat masih sangat terbatas. Masih ada anggapan bahwa kecacatan adalah sesuatu hal yang memalukan, sesuatu kekurangan yang harus diperbaiki dan dinormalkan.

### **Strategi menuju Perubahan**

- Meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu penyandang cacat
- Membuka kesempatan lebih luas bagi penyandang cacat untuk berpartisipasi aktif di masyarakat
- Mengikutsertakan penyandang cacat dalam pergerakan isu-isu sosial lainnya
- Merubah sikap sosial masyarakat terhadap penyandang cacat
- Membuka luas kesempatan dalam pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
- Menyediakan fasilitas publik termasuk sarana transportasi umum yang aksesibel untuk semua
- Pelayanan pendidikan dan advokasi bagi penyandang cacat dan keluarganya
- Jaringan kerjasama antar organisasi
- Kesempatan bagi penyandang cacat dalam mengambil keputusan
- Mengikutsertakan penyandang cacat sebagai kontrol pelayanan publik

Demikian tulisan ini saya sampaikan sebagai bahan untuk informasi anda terhadap isu-isu penyandang cacat di Indonesia.

## TIPS BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG CACAT

Yang paling penting untuk diingat dalam berinteraksi dengan penyandang cacat adalah tidak beranggapan apapun. Bila anda memiliki pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, bahasa atau istilah apa yang digunakan, bantuan apa yang diperlukan jika ada yang dibutuhkan, penyandang cacatlah yang sebaiknya menjadi sumber pertama dan terbaik bagi anda. Jangan pernah ragu untuk bertanya!

Ketika berbicara dengan penyandang cacat, berfokuslah pada kenyataan bahwa ini adalah percakapan antar dua orang. Selalu ingat bahwa anda berbicara kepada orang/manusia bukan pada kecacatannya. Bersabarlah dengan orang yang memiliki kecacatan seperti bersabar pada diri anda sendiri. Frustrasi dalam percakapan mungkin saja timbul dari kedua belah pihak dan memerlukan pengertian di kedua belah pihak. **YANG TERPENTING, APA YANG DIBICARAKAN BUKAN BAGAIMANA BERBICARA!**